

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdul Kadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Martokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B. . (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sobirin, Malian. (2019). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Garasindo.

### b. Jurnal

- Ahmad, B. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Riset Perpajakan*, 3.
- Badriyah, S. (N.D.). Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya. Cramedia Blok.
- Danarsi. (N.D.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak

- Progresif Di Kota Surakarta. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Hukum*, 59.
- Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(Pajak).
- Kusumawati, I. (2021). *Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 11.*
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akmenika*, 15(Progrqn E-Samsat).

**c. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pajak No. 16 Tahun 2009

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

**d. Skripsi**

Octavianingtyas. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Pajak, Biaya Kepatuhan , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.*

**e. Website**

- Ari-sunandar. (2022). *Tahun 2021, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wonosobo Capai 76 Miliar Lebih*. Sorot Wonosobo.
- BPS. (2021). *Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah), 2019-2021*. Jateng Bps.Go.Id.
- Imah Masitoh. (2023). *50 Ribu Kendaraan di Wonosobo Nggak Pajak, Ini Bocoran Lokasi Razia Polisi Artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul 50 Ribu Kendaraan di Wonosobo Nggak Pajak, Ini Bocoran Lokasi Razia Polisi, <https://banyumas.tribunnews.com/2023/09/>*. Tribun Banyumas.
- Sigit Rahmanto. (2023). *Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp 30 Miliar*. Jawa Pos.
- Korlantas. (2023). *Jumlah Data Kendaraan Polda Jawa Tengah*. Korlantas Polri.